JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI PRESENSI PEGAWAI (SIPP HSU) PADA KANTOR KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Zahratunnisa[1], Muhamad Arsyad[2], Siti Paulina[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: nzahratun157@gmail.com

ABSTRAK

Studi kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Aplikasi Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP HSU) sekaligus mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya di Kantor Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian mencakup kendala teknis jaringan internet, ketidakstabilan server, keterlambatan maupun kelalaian pegawai dalam mencatat kehadiran, serta belum adanya pengawasan langsung dari pihak BKPSDM. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 17 informan yang ditentukan via *purposive sampling*. Analisis data mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, serta *member check*. Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi SIPP HSU berada pada kategori cukup efektif. Indikator pemahaman tujuan, strategi, kesiapan sarana, dan kemampuan operasional pegawai tergolong efektif, walaupun aspek ketercapaian sasaran, ketersediaan SOP lokal, kestabilan akses internet, pengawasan, serta evaluasi khusus masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan gawai pintar dan Wi-Fi menjadi pendorong utama, sedangkan kendala teknis aplikasi dan koneksi kantor menjadi hambatan terbesar. Oleh sebab itu, pihak kecamatan disarankan memperkuat koordinasi bersama BKPSDM untuk pengawasan serta evaluasi berkala guna meningkatkan kedisiplinan aparatur secara konsisten demi terwujudnya tata kelola administrasi kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Efektivitas Aplikasi, Presensi Pegawai, Disiplin Kerja

ABSTRACT

This qualitative study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Employee Attendance Information System Application (SIPP HSU) while identifying its driving and inhibiting factors at the Banjang District Office, Hulu Sungai Utara Regency. The main problems underlying the research include technical constraints on the internet network, server instability, delays or negligence of employees in recording attendance, and the lack of direct supervision from the BKPSDM. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation of 17 informants determined via purposive sampling. Data analysis included data reduction, presentation, and conclusion drawing, while data validity was tested through extended observation, increased diligence, triangulation, negative case analysis, and member checks. Field findings indicate that the implementation of SIPP HSU is in the moderately effective category. Indicators of understanding objectives, strategies, facility readiness, and employee operational capabilities are classified as effective, although aspects of target achievement, availability of local SOPs, stable internet access, supervision, and specific evaluation still need to be improved. The availability of smart devices and Wi-Fi are the main drivers, while technical constraints on the application and office connection are the biggest obstacles. Therefore, sub-districts are advised to

strengthen coordination with the Human Resources Development Agency (BKPSDM) for periodic monitoring and evaluation to consistently improve employee discipline and achieve professional, transparent, and accountable personnel administration.

Keywords: *Application Effectiveness, Employee Attendance, Work Discipline*

PENDAHULUAN

Evolusi teknologi informasi yang pesat di era Industri 4.0 telah mendesak pergeseran mendasar dalam tata kelola birokrasi pemerintahan Indonesia. Transformasi digital ini direalisasikan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang berfokus menciptakan tata kelola publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam ekosistem birokrasi, pilar krusial yang mengalami komputerisasi adalah sistem manajemen kehadiran pegawai, mengingat rekam jejak presensi menjadi indikator fundamental untuk mengukur tingkat integritas serta profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepatuhan aparatur terhadap ketentuan jam kerja serta kewajiban hadir secara konsisten telah ditegaskan secara yuridis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemanfaatan teknologi presensi digital ini diharapkan mampu meminimalisasi potensi kecurangan manipulasi data serta menghadirkan efisiensi dan transparansi pengawasan kedisiplinan pegawai.

Sebagai wujud konkret SPBE, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerapkan aplikasi Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP HSU) berbasis perangkat seluler dan geolokalisi yang terintegrasi secara langsung dengan Sistem Informasi Kepegawaian Online (SIKon). Landasan operasional sistem ini berpedoman pada Peraturan Bupati HSU Nomor 19 Tahun 2021 demi memoderasi administrasi kepegawaian dan meningkatkan ketertiban jam kerja (situs resmi SIPP HSU, 2025). Berbekal teknologi Global Positioning System (GPS) serta identifikasi biometrik, SIPP HSU membatasi radius pencatatan kehadiran melalui fitur geofencing, verifikasi wajah, serta deteksi Fake GPS guna memastikan keabsahan kedatangan pegawai secara instan. Di samping itu, tingkat keakuratan data presensi yang dihasilkan platform ini dijadikan basis kalkulasi objektif dalam penetapan besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati HSU Nomor 01 Tahun 2024.

Kendati Kantor Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memberlakukan SIPP HSU guna menyokong efisiensi fungsi administrasi dan pelayanan publik, pelaksanaan operasional di lapangan masih diwarnai oleh serangkaian kendala krusial. Berdasarkan pengamatan empiris, permasalahan pertama berkisar pada ketidakstabilan koneksi jaringan internet dan server yang memicu kegagalan proses check-in maupun check-out pegawai secara real-time. Kedua, komitmen terhadap ketepatan jam kerja masih belum konsisten, di mana rekapitulasi presensi periode Januari hingga Maret 2026 mencatat 38 ASN melakukan pelanggaran dengan akumulasi 200 kali keterlambatan (15 keterlambatan ditolak oleh admin). Permasalahan ketiga terletak pada belum dilaksanakannya pengawasan langsung secara tatap muka oleh BKPSDM Kabupaten HSU, di mana evaluasi kedisiplinan masih sebatas pemantauan berkas bulanan secara daring tanpa kunjungan inspeksi preventif ke Kantor Kecamatan Banjang.

Guna menganalisis efektivitas penerapan teknologi presensi tersebut, landasan teoretis mengenai efektivitas organisasi menjadi acuan utama. Prihartono (2012, dalam Syamsurijal, 2025:48) menjelaskan efektivitas sebagai tolok ukur yang menandai sejauh mana target atau sasaran organisasi berhasil direalisasikan. Sejalan dengan hal itu, Steers (1985, dalam Syamsurijal, 2025:48) mengemukakan bahwa efektivitas merefleksikan kesesuaian antara luaran (output) riil dengan perencanaan awal. Dari sudut pandang rasionalitas organisasi, Mahmudi (dalam Meidiansyah et al., 2024:61) menegaskan efektivitas sebagai rasio kontribusi output terhadap pencapaian tujuan. Sementara itu, Effendy (1989, dalam Sawir, 2020:126) menekankan keterikatan pencapaian tujuan pada ketepatan alokasi anggaran, tenggat waktu, dan jumlah personel, yang disempurnakan oleh

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Siswanto (2007, dalam Ananda dkk., 2025:21) melalui prinsip doing the right things atau ketepatan dalam memilih sasaran strategis instansi.

Pengukuran efektivitas program memerlukan dimensi dan indikator evaluasi yang komprehensif. Steers (1985, dalam Meidiansyah et al., 2024:62) memformulasikan tiga kriteria utama ukuran efektivitas, yakni pencapaian tujuan melalui penahapan kurun waktu dan target konkret, integrasi berupa sosialisasi dan pengembangan konsensus antarorganisasi, serta adaptasi yaitu kapabilitas penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Di sisi lain, Budiani (2007, dalam Suhaimi et al., 2024:136) merinci empat indikator efektivitas program, meliputi akurasi sasaran untuk menilai kesesuaian penerima manfaat, sosialisasi program guna memastikan ketersebaran informasi aturan, keharmonisan tujuan program dengan realisasi hasil, serta pemantauan program secara berkelanjutan. Seluruh indikator ini menjadi tolok ukur kritis untuk menilai sejauh mana alur kerja SIPP HSU memberikan dampak nyata pada organisasi. Sesuai penjelasan Sugiyono (2017:60), kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam konteks efektivitas SIPP HSU di Kantor Kecamatan Banjang, analisis dialokasikan menggunakan teori Gibson (Tangkalisan, 2005, dalam Affandi et al., 2023:90-92) yang memetakan tujuh variabel efektivitas organisasi. Ketujuh variabel tersebut mencakup: kejelasan tujuan yang hendak diraih, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis serta perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang dan terstruktur, penyusunan prioritas program secara tepat, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang (seperti kelancaran akses internet), serta keberadaan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik bagi para pegawai.

Secara konseptual, sistem informasi merupakan gabungan terstruktur dari komponen manusia, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan telekomunikasi, dan sumber daya data yang bertugas mengumpulkan, memproses, serta menyebarkan informasi. Fahri Rusliyadi dan Linda Sari Dewi (dalam Putra, 2024:6) menekankan perlunya aturan prosedur formal dan mekanisme umpan balik untuk melakukan tindakan korektif dalam sistem. Perkembangan ini melahirkan inovasi absensi online, yang menurut Putra (2024:8) merupakan modernisasi pengelolaan kehadiran dari metode manual konvensional ke platform digital. Yulianto (dalam Putra, 2024:8) menegaskan bahwa absensi online memanfaatkan cloud computing berbasis internet untuk mengamankan data secara terpusat, sedangkan Triyono (dalam Putra, 2024:8) menambahkan bahwa teknologi nirkabel ini membebaskan pegawai dari perangkat fisik statis seperti mesin fingerprint, sekaligus memfasilitasi pemantauan titik koordinat lokasi secara real-time.

Dalam ranah komputasi, Hengky W. Pramana (dalam Pane, 2020:53) mendefinisikan aplikasi sebagai perangkat lunak pelaksana perintah spesifik, sementara Sri Widianti (dalam Pane, 2020:53) mengartikannya sebagai front-end pengolah data menjadi informasi bermanfaat. Aplikasi SIPP HSU yang dikembangkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten HSU hadir sebagai platform digital berbasis Android/iOS yang dibekali fitur notifikasi pengingat, integrasi Single Sign On Portal, serta proteksi root, emulator, dan Fake GPS. Meskipun absensi digital menawarkan efisiensi administrasi, akurasi data real-time, aksesibilitas, serta integrasi sistem penggajian, penerapan online ini masih memiliki kelemahan bawaan seperti ketergantungan pada jaringan internet dan listrik, risiko kerentanan peretasan, kendala teknis bug, serta resistensi adaptasi pegawai. Oleh karena itu, pembenahan infrastruktur dan pengawasan ketat menjadi kunci optimalisasi SIPP HSU di Kecamatan Banjang.

METODE

Penetapan situs pelaksanaan riset empiris ini bertempat di Kantor Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan arena penelitian ini didasarkan pada pertimbangan rasional-metodologis, mengingat instansi birokrasi pemerintahan di tingkat kecamatan tersebut merupakan salah satu unit kerja yang telah mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP HSU) sebagai instrumen utama pencatatan absensi harian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penentuan lokasi ini dipandang sangat representatif untuk memetakan pelaksanaan teknis serta menguji tingkat efektivitas operasional dari penerapan teknologi presensi berbasis geofencing pada unit pelayanan publik daerah.

Kerangka metodologis yang diartikulasikan dalam kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Berdasarkan kerangka teoretis yang dirumuskan oleh Sugiyono (2019), paradigma kualitatif difungsikan sebagai metode ilmiah untuk menyelidiki kondisi objek penelitian yang bersifat alamiah (*naturalistic setting*), di mana peneliti menempatkan diri secara langsung sebagai instrumen kunci (*key instrument*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berorientasi pada pemahaman yang komprehensif, intuitif, dan mendalam mengenai realitas efektivitas operasional aplikasi SIPP HSU di Kantor Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanpa mengisolasikan fenomena dari konteks sosialnya.

Riset ini dirancang menggunakan tipologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dipaparkan dalam konsepsi Sugiyono (2019), riset deskriptif ditujukan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan memaparkan gambaran nilai suatu variabel secara mandiri tanpa menyertakan tindakan komparasi ataupun pengujian relasi kausalitas antarvariabel. Melalui tipe penelitian ini, peneliti berupaya merekam dan mendeskripsikan potret empiris secara terperinci mengenai implementasi, performa, serta efektivitas aplikasi SIPP HSU di Kantor Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga menghasilkan uraian naratif yang kontekstual dan kaya akan data lapangan.

Data dalam penelitian kualitatif ini berwujud naskah deskriptif naratif yang mencakup kutipan verbal, catatan tindakan, serta dokumen kelembagaan, bukannya deretan angka statistik. Merujuk pada pemikiran Sugiyono (2019:194), data primer diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau pengisian instrumen riset. Sementara itu, data sekunder mencakup informasi tidak langsung seperti arsip resmi, laporan rekapitulasi kehadiran, dan dokumen regulasi. Penentuan informan kunci menerapkan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu di mana informan dipandang paling kompeten dan menguasai fakta dari objek penelitian.

Desain operasional penelitian merangkum penjelasan terstruktur mengenai tahapan sistematis serta alur kerja teknis yang dilalui peneliti dalam mengawali hingga mengakhiri penelitian kualitatif ini. Jenis desain yang diterapkan adalah studi kasus kualitatif (*qualitative case study*), yang dirancang untuk menganalisis penerapan aplikasi SIPP HSU dalam konteks lingkungan nyata pada Kantor Kecamatan Banjang. Melalui alur kerja operasional ini, fokus perhatian dialokasikan pada pemetaan proses pelaksanaan, penggalian pengalaman intuitif para pegawai selaku pengguna sistem (*end-user*), serta identifikasi luaran nyata yang dihasilkan terhadap peningkatan kedisiplinan kerja aparatur.

Guna mengumpulkan data empiris yang sahih dan komprehensif, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang memadukan tiga metode utama: observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), observasi merupakan teknik pengumpulan data berbasis pengamatan langsung terhadap aktivitas dan perilaku objek dalam ekosistem alamiahnya. Selanjutnya, teknik wawancara dimanfaatkan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta sudut pandang subjektif para informan secara detail (Sugiyono, 2019). Sebagai penguat, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan arsip, laporan presensi, serta catatan resmi kelembagaan sebagai pelengkap data verbal (Sugiyono, 2019).

Proses pengolahan dan analisis data dilaksanakan secara sistematis dan interaktif merujuk pada kerangka pemikiran Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2023:132). Tahap awal diawali dengan reduksi data, yakni kegiatan memilah, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah dari lapangan agar berpusat pada isu efektivitas SIPP HSU dan kedisiplinan pegawai. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu penyusunan

sekumpulan informasi yang terstruktur ke dalam teks naratif, matriks, atau bagan guna memperlihatkan pola dan relasi fenomena. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing*), di mana peneliti merumuskan makna mendalam atas data yang telah diolah.

Pengujian kredibilitas dilakukan untuk menjamin bahwa data yang dihimpun benar-benar mencerminkan fenomena empiris di lapangan. Mengacu pada pandangan Sugiyono (2023:185), uji kredibilitas dilaksanakan melalui beberapa prosedur: perpanjangan pengamatan untuk mempererat hubungan dengan informan; peningkatan ketekunan melalui pembacaan ulang catatan riset secara cermat; triangulasi teknik, sumber, dan waktu; analisis kasus negatif guna menguji data yang bertentangan; serta *member check* untuk mengonfirmasi kembali draf temuan kepada para informan agar informasi yang dipublikasikan selaras dengan maksud asli dari naskah wawancara.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi dan Presensi (SIPP HSU) Pada Kantor Kecamatan Banjang

1. Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

a. Kejelasan tujuan

Pemahaman yang mendalam mengenai sasaran instansi menjadi penentu utama keberhasilan implementasi aplikasi SIPP HSU di Kantor Kecamatan Banjang. Berdasarkan temuan hasil wawancara serta pengamatan di lapangan, indikator kejelasan tujuan penggunaan sistem ini tergolong sangat efektif. Seluruh aparatur telah memiliki kesamaan persepsi dan berhasil menerapkannya secara konkret guna mengikis kerumitan birokrasi yang lamban. Langkah ini secara nyata mampu menciptakan iklim kerja yang jauh lebih transparan, responsif, serta efisien.

Capaian positif ini sejalan dengan konsep efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi, A. et al, 2023:90-92). Teori tersebut menerangkan bahwa penentuan sasaran yang presisi memudahkan seluruh elemen organisasi dalam menyusun strategi terbaik demi meraih keberhasilan bersama melalui evaluasi capaian secara teratur. Dalam konteks ini, ketegasan fokus untuk mendongkrak kedisiplinan dan efisiensi presensi di Kecamatan Banjang telah bergerak harmonis dengan agenda transformasi digital Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Mencapai sasaran

Pencapaian sasaran mencerminkan sejauh mana keluaran yang diharapkan dari pengoperasian suatu aplikasi dapat terealisasi. Berdasarkan temuan wawancara dan pengamatan langsung, indikator ini pada penerapan platform digital SIPP HSU di Kantor Kecamatan Banjang tergolong kurang efektif. Perangkat lunak tersebut sukses mendorong efisiensi tata kelola presensi, fleksibilitas kerja, serta kemudahan pemantauan kedisiplinan aparatur. Kendati demikian, pemenuhan target belum sepenuhnya maksimal akibat hambatan teknis seperti gangguan jaringan serta kelambatan peladen pada jam-jam sibuk di samping faktor kesalahan manusia berupa keterlambatan staf dan insiden alpa mencatatkan kehadiran secara berkala.

Kondisi ini selaras dengan teori efektivitas organisasi dari Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi, A. et al, 2023: 90-92). Konsep tersebut menekankan pentingnya penetapan tolok ukur kerja oleh suatu lembaga yang kemudian dievaluasi tingkat ketercapaiannya. Apabila dijumpai rintangan maupun kendala operasional dalam proses merealisasikan sasaran tersebut, entitas organisasi berkewajiban melakukan peninjauan ulang guna merumuskan formulasi serta strategi baru yang lebih adaptif dan solutif.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan
   a. Kejelasan Strategi

      Kejelasan strategi mencakup ketepatan tata cara maupun pendekatan yang diadopsi guna mewujudkan sasaran dari pengimplementasian aplikasi SIPP HSU. Temuan melalui kegiatan wawancara serta observasi lapangan mengindikasikan bahwa indikator ini telah berjalan efektif pada Kantor Kecamatan Banjang. Alur kerja telah terurai secara rinci meliputi tahapan sosialisasi, eksekusi teknis, pendampingan, hingga pengawasan berkelanjutan, sehingga memudahkan aparatur dalam menjalankan presensi harian secara disiplin dan terpantau. Di samping itu, mekanisme peninjauan tetap dilakukan sebagai sarana evaluasi untuk merumuskan formulasi strategi baru.

      Realitas empiris tersebut selaras dengan konsep efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi et al., 2023:90-92). Kerangka teoretis ini menegaskan bahwa keberadaan tujuan yang jelas wajib diimbangi oleh penyusunan taktik operasional yang terstruktur serta terperinci demi mempermudah tahap pelaksanaan di lapangan. Penjabaran langkah yang matang ini menjadi kunci instansi dalam menjamin pencapaian target kinerja secara optimal dan efisien.

   b. Langkah-langkah pelaksanaan

      Tahapan eksekusi merupakan manifestasi nyata dalam membumikan sebuah strategi kebijakan. Berdasarkan trianggulasi data melalui wawancara, pengamatan lapangan, serta studi dokumentasi, penerapan aplikasi SIPP HSU di Kantor Kecamatan Banjang terbukti berjalan efektif. Rangkaian operasional tersebut telah menempuh alur yang teratur dan logis, dimulai dari tahapan sosialisasi, pemasangan perangkat lunak, aktivasi akun, pemanfaatan harian, hingga proses pengawasan. Keteraturan prosedur ini mencerminkan komitmen instansi dalam menghadirkan tata kelola teknologi yang terencana secara matang.

      Pencapaian tersebut sejalan dengan konsep efektivitas organisasi yang dicetuskan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi, A. et al., 2023:90-92). Landasan teoritis ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah rencana strategis sangat bergantung pada penerjemahannya ke dalam alur kerja operasional yang rinci dan taktis. Melalui pembagian tahapan kerja yang jelas, seluruh pelaksana dapat menjalankan aplikasi dengan lebih mudah, tepat sasaran, serta efisien demi mencapai tujuan kinerja lembaga.

      .

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
   a. Adanya SOP

      Temuan empiris melalui wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen mengindikasikan bahwa indikator ketersediaan pedoman operasional dalam penerapan aplikasi sistem informasi presensi pegawai (SIPP HSU) di Kantor Kecamatan Banjang tergolong cukup efektif. Mayoritas aparatur telah memahami tata cara penggunaan sistem ini secara praktis, serta mendapat dukungan regulasi dari pemerintah kabupaten. Kendati demikian, pelaksanaan di lapangan belum didukung oleh dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang dirumuskan secara khusus pada tingkat kecamatan.

      Kondisi tersebut selaras dengan pandangan efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi, A. et al, 2023:90-92). Perspektif teoritis ini menekankan krusialnya proses analisis dan formulasi kebijakan yang matang, termasuk penyediaan SOP sebagai panduan baku yang jelas. Adanya acuan terstandarisasi sangat dibutuhkan agar implementasi program dapat berlangsung secara konsisten, teratur, serta tidak memicu kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

   b. Kesesuaian SOP

      Kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) merefleksikan sejauh mana operasionalisasi suatu sistem informasi selaras dengan aturan main yang telah ditetapkan.

Melalui rangkaian penggalian data berupa wawancara mendalam, pengamatan lapangan, serta verifikasi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa indikator kesesuaian SOP dalam tahapan analisis maupun perumusan kebijakan integrasi SIPP HSU di Kantor Kecamatan Banjang sudah berada pada kategori efektif. Secara teknis, alur penggunaan aplikasi memang telah berjalan sesuai mekanismenya, kendati pelaksanaan tersebut kenyataannya masih belum ditunjang oleh dokumen SOP tertulis yang terperinci pada tingkatan kecamatan.

Kondisi faktual tersebut memperkuat teori efektivitas organisasi yang dicetuskan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi, A. et al., 2023:90-92). Kerangka pemikiran tersebut menegaskan pentingnya konsistensi dalam perancangan kebijakan serta mekanisme kerja, yang mana ketersediaan aturan tertulis yang tegas menjadi pilar utamanya. Dukungan pedoman resmi sangat diperlukan guna menjamin keselarasan antara perencanaan dan praktik operasional, sehingga mampu meminimalisasi potensi disorientasi serta kebingungan kerja bagi para aparatur dalam jangka panjang.

4. Perencanaan yang matang
   a. Kejelasan rencana

Tingkat kejelasan rancangan operasional dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP HSU) di Kantor Kecamatan Banjang tergolong sudah sangat efektif. Berdasarkan hasil wawancara mendalam serta pengamatan langsung di lapangan, skema pelaksanaan presensi digital ini telah dipersiapkan secara matang oleh pihak instansi. Pengikutsertaan seluruh aparatur tidak sekadar sebatas instruksi untuk mengunduh aplikasi, melainkan ditunjang oleh sistem pengawasan harian yang terintegrasi melalui penerbitan petunjuk teknis kerja serta penetapan administrator khusus sebagai penanggung jawab operasional harian.

Keberhasilan pencapaian ini sejalan dengan teori efektivitas organisasi yang dicetuskan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi, A. et al., 2023:90-92). Landasan teoritis tersebut menegaskan bahwa tingkat efektivitas lembaga akan optimal manakala organisasi memiliki perencanaan yang terstruktur rapi, di mana salah satu indikator utamanya ditunjukkan oleh kejelasan alur rencana kerja. Dengan demikian, kesiapan tata kelola operasional SIPP HSU di Kecamatan Banjang terbukti mampu mendukung terwujudnya efektivitas kerja instansi secara nyata.

   b. Kemampuan pelaksanaan SIPP HSU

Kapasitas eksekusi merujuk pada tingkat kompetensi aparatur dalam mengoperasikan Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP HSU). Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara mendalam, penerapan platform digital tersebut di Kantor Kecamatan Banjang terbukti telah berlangsung efektif. Meskipun sempat menghadapi kendala teknis minor pada masa transisi awal, kini mayoritas pegawai telah mampu menjalankan aplikasi secara lancar dan mandiri. Keberhasilan adopsi teknologi ini didukung oleh kemudahan antarmuka sistem serta ketersediaan pendampingan yang konsisten bagi para pengguna.

Kondisi ini selaras dengan pilar teori efektivitas organisasi yang dicetuskan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005, seperti dikutip dalam Affandi, A. et al., 2023:90-92). Kerangka pemikiran tersebut menekankan bahwa kecakapan riil pegawai dalam mengeksekusi program digital menjadi faktor penentu utama bagi keberhasilan perencanaan serta pencapaian sasaran strategis instansi. Dengan demikian, penguasaan teknis presensi pegawai di Kecamatan Banjang tidak hanya menyelesaikan tugas administratif harian, melainkan juga secara nyata mendorong efektivitas tata kelola kelembagaan secara menyeluruh

5. Penyusunan Program Yang Tepat
   a. Program sesuai harapan

      Keselarasan antara rancangan agenda dengan kehendak serta kebutuhan instansi menjadi tolok ukur utama bagi keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen, pelaksanaan aplikasi SIPP HSU di Kantor Kecamatan Banjang terbukti telah berjalan secara efektif. Inovasi digital ini mampu mengakomodasi ekspektasi lembaga melalui peningkatan efisiensi operasional, keluwesan kerja, hingga kepraktisan dalam pencatatan kehadiran. Kendati demikian, pembenahan pada aspek tingkat kedisiplinan pegawai masih menyisakan ruang untuk ditingkatkan secara berkelanjutan.

      Realitas di lapangan tersebut amat sejalan dengan pemikiran efektivitas kelembagaan yang dikemukakan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi, A. et al., 2023:90-92). Kerangka konseptual ini menekankan bahwasanya perumusan program kerja wajib berorientasi pada pemenuhan target serta urgensi nyata sebuah organisasi. Ketika strategi yang dirancang sanggup menjawab tuntutan internal secara tepat sasaran, maka program operasional dipastikan dapat terealisasi secara optimal, berdaya guna tinggi, serta memberikan kontribusi positif yang berkesinambungan bagi pencapaian tujuan bersama.

   b. Waktu pelaksanaan

      Keselarasan antara realisasi kegiatan dengan rencana skedul yang telah ditentukan menjadi tolok ukur utama ketepatan waktu pelaksanaan. Merujuk pada hasil penggalian data melalui wawancara, pengamatan lapangan, serta penelusuran dokumen, indikator durasi pelaksanaan dalam perancangan program SIPP HSU di Kantor Kecamatan Banjang telah menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Penerapan pencatatan kehadiran ini berjalan beriringan dengan lini masa operasional, sehingga sukses memandu para pegawai dalam meningkatkan komitmen kedisiplinan kerja, meskipun masih ditemukan sejumlah kasus keterlambatan secara individual.

      Kondisi aktual di lapangan ini selaras dengan konsep dasar efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi, A. et al., 2023:90-92). Pemikiran tersebut menegaskan bahwa penetapan alokasi waktu yang presisi beserta tenggat akhir pengerjaan merupakan syarat mutlak dalam perancangan program. Penjadwalan yang terstruktur secara mantap akan mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, terarah, dan konsisten, sehingga seluruh target strategis yang ditetapkannya dapat terealisasi secara maksimal sesuai tujuan utama organisasi.

6. Tersedianya Sarana Dan Prasarana
   a. Sarana prasarana yang tersedia

      Dukungan sarana dan prasarana mencakup ketersediaan instrumen serta fasilitas penunjang yang amat krusial bagi kelancaran pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP HSU). Berdasarkan hasil kompilasi data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi, penerapan SIPP HSU di Kantor Kecamatan Banjang tergolong cukup efektif. Penggunaan gawai pribadi pegawai yang dipadukan dengan ketersediaan jaringan Wi-Fi lokal sukses mendasari pelaksanaan presensi secara elektronik. Meskipun demikian, gangguan pada stabilitas jaringan internet masih kerap menjadi hambatan teknis yang menghambat responsivitas sistem.

      Kondisi empiris ini selaras dengan konsep efektivitas organisasi yang dipaparkan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi, 2023:90-92). Teori ini menekankan bahwa kelengkapan sarana pendukung yang rasional dan memadai sanggup memperkuat daya dukung serta ketercapaian program secara bermakna. Ketika sarana operasional dapat difungsikan dengan baik, institusi tidak hanya mampu menyukseskan implementasi

teknologi baru, melainkan juga lebih mudah dalam merealisasikan berbagai tujuan strategis lembaga yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Adanya akses internet

Ketersediaan serta kestabilan koneksi internet merupakan elemen kunci dalam menunjang pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP HSU). Berdasarkan penelusuran data melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen, indikator aksesibilitas internet pada variabel sarana prasarana di Kantor Kecamatan Banjang tergolong cukup efektif. Walaupun pihak instansi telah memfasilitasi jaringan Wi-Fi lokal, kendala konektivitas masih kerap muncul lantaran faktor cuaca buruk maupun pemeliharaan teknis. Hambatan ini memicu kemacetan saat proses pencatatan kehadiran, sehingga memaksa sejumlah aparatur memanfaatkan kuota internet pribadi demi memastikan absensi terekam secara tepat waktu.

Fenomena tersebut menandakan bahwa optimalisasi aplikasi SIPP HSU belum sepenuhnya sejalan dengan konsep efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi, A. et al., 2023:90-92). Teori ini menegaskan bahwa keberadaan sarana beserta prasarana yang representative termasuk keandalan sambungan internet menjadi syarat mutlak dalam mendorong keberhasilan dan efektivitas kinerja program lembaga. Tanpa dukungan infrastruktur digital yang konsisten, pencapaian sasaran operasional organisasi akan terus menghadapi kendala nyata.

7. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Mendidik

a. Adanya pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP HSU) di Kantor Kecamatan Banjang berdasarkan hasil wawancara serta observasi lapangan dapat dikategorikan kurang efektif. Mekanisme kontrol ini diselenggarakan melalui kolaborasi antara pengelola kepegawaian, jajaran pimpinan, integrasi sistem presensi digital, dan kegiatan apel pagi sebagai sarana pemeliharaan kedisiplinan aparatur. Kendati demikian, tingkat efektivitas pengawasan tersebut masih perlu dioptimalkan kembali karena tindakan pelanggaran disiplin masih dijumpai. Kendala utamanya bersumber dari belum maksimalnya pemantauan secara langsung di lapangan, sehingga skema pengawasan sejauh ini masih sangat bertumpu pada data otomatisasi aplikasi semata.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa praktik pengawasan yang berjalan belum sepenuhnya sejalan dengan pandangan efektivitas organisasi menurut Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi et al., 2023:90–92). Dalam landasan teoritis tersebut, ditegaskan bahwa sistem pengendalian yang bersifat edukatif idealnya tidak sekadar menjalankan fungsi pemantauan, tetapi wajib mampu mengarahkan, mengendalikan, serta membenahi pola perilaku pegawai secara berkelanjutan. Langkah perbaikan perilaku inilah yang menjadi kunci utama agar seluruh target dan tujuan organisasi dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

b. Adanya evaluasi

Temuan hasil wawancara, pengamatan langsung, dan penelusuran dokumen menunjukkan bahwa indikator evaluasi pada variabel pengawasan serta pengendalian edukatif terkait penerapan aplikasi Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP HSU) di Kantor Kecamatan Banjang tergolong cukup efektif. Penilaian tersebut berlangsung lewat rekapitulasi presensi bulanan, forum koordinasi, serta pemantauan kedisiplinan pegawai sebagai pijakan pembinaan, teguran, hingga penyesuaian TPP. Namun, fokus peninjauan ini sebatas pada rekam jejak kehadiran staf dan belum menyentuh evaluasi terencana yang secara khusus menguji keandalan operasional aplikasi SIPP HSU.

Fenomena tersebut belum selaras dengan teori efektivitas organisasi dari Gibson (Tangkilisan, 2005 dalam Affandi, A. et al., 2023:90-92), yang menegaskan bahwa

evaluasi semestinya dijalankan secara sistematis dan konsisten. Kendati pengawasan rutin melalui rekap absensi serta tindakan administratif sudah ada, sejumlah informan mengonfirmasi bahwa audit atau peninjauan khusus yang secara mendalam menguji efektivitas penggunaan platform SIPP HSU hingga kini belum pernah dilaksanakan secara terstruktur.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi sistem informasi presensi pegawai (SIPP HSU) pada Kantor Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung
   a. Ketersediaan Perangkat Handpnone Pegawai
   b. Adanya Fasilitas Wifi Kantor
2. Faktor Penghambat
   a. Gangguan jaringan internet kantor
   b. Kendala teknis pada aplikasi

SIMPULAN

Hasil kajian mengenai tingkat kehandalan Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP HSU) pada Kantor Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menunjukkan kualifikasi yang cukup efektif jika ditinjau melalui kerangka konseptual efektivitas organisasi menurut Gibson (Tangkilisan, 2005, seperti yang dikutip oleh Affandi et al., 2023:90-92). Analisis terhadap dimensi kejelasan tujuan membuktikan bahwa pemahaman para aparatur terhadap intensi digitalisasi presensi guna memacu integritas, keterbukaan, dan efisiensi kerja telah terbangun secara homogen, meskipun pemenuhan pencapaian sasaran belum sepenuhnya maksimal lantaran terhalang oleh gangguan koneksi internet, kendala teknis sistem, serta kelalaian personal pegawai. Pada aspek kejelasan strategi pencapaian, penetapan tahapan operasional dinilai berdaya guna melalui pemaparan sosialisasi, pendampingan teknis, instalasi, hingga pengawasan berjenjang yang mempermudah proses aktivasi sampai pemanfaatan harian secara sistematis. Mengenai mekanisme analisis dan perumusan kebijakan, kepatuhan staf terhadap tata cara presensi berjalan cukup responsif sesuai dengan instruksi teknis bawaan aplikasi, walaupun standar operasional prosedur (SOP) tertulis secara khusus di tingkat kantor kecamatan belum diterbitkan. Sementara itu, dimensi perencanaan yang matang terefleksi dari kesiapan administratif melalui penunjukan admin pengelola serta tingginya kecakapan mandiri mayoritas personel dalam mengoperasikan SIPP HSU setelah menerima pembekalan. Ditinjau dari ketepatan penyusunan program, platform ini terbukti memberikan kepraktisan, keteraturan jam kerja, serta fleksibilitas presensi yang selaras dengan regulasi instansi, kendati sesekali masih diwarnai keterlambatan dari oknum pegawai. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang juga tergolong cukup memadai berkat integrasi pemanfaatan gawai pintar pribadi pegawai dan penyediaan fasilitas wi-fi kantor, walau aksesibilitas jaringan internet masih kerap mengalami fluktuasi hambat. Di samping itu, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik telah diupayakan melalui pemantauan pimpinan, pengelola kepegawaian, serta pembinaan rutin melalui apel pagi, meskipun supervisi secara langsung terhadap interaksi pengguna pada sistem presensi digital ini belum optimal sehingga celah pelanggaran disiplin belum terkikis sepenuhnya; begitu pula proses evaluasi bulanan melalui peninjauan rekapitulasi kehadiran dan sanksi pemotongan TPP masih berfokus pada hasil akhir tanpa adanya tinjauan terstruktur khusus terhadap kendala aplikasi. Keseluruhan dinamika efektivitas ini dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa kesiapan perangkat smartphone mandiri serta ketersediaan wi-fi instansi, yang sayangnya masih dihadapkan pada faktor penghambat utama berupa ketidakstabilan bandwidth internet serta gangguan kelumpuhan server akibat lonjakan akses bersamaan pada jam sibuk, terutama saat jam pulang kerja di hari Jumat.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Anonim, Pedoman penyusunan dan penulisan skripsi program studi S1 Administrasi Publik

Adipura, P. N. (2020). *Dasar-Dasar Teknik Informatika.* Yogyakarta: CV Budi Utama

Afandi, P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Affandi. et al., (2023) *Strategi Perencanaan Sumber daya Manusia,* Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Ananda, R., Amiruddin, & Hamidah. (2025). *Variabel Kerja (Komplikasi Konsep).* Medan: UMSU Press.

Aprianti, T. (2023). Efektivitas absensi elektronik dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis (JUPSIM),* Vol. 2, No. 3, hal 28-44

Farnovan, R., Idris, A., & Apriani, F. (2025). *Regu Khusus: Strategi dalam Keterbatasan.* Indramayu: Penerbit Adab.

Gatto, A. P. & Awangga, M. R (2023) *Pengelompokkan Disiplin Pegawai Berdasarkan Absensi Menggunakan Algoritma K-Means.* Bandung: PT Buku Pedia

Giery, Munawarah, & Arsyad, M. (2025). Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Presensi Pegawai (SIPP) dalam Meningkatkan Disiplin Guru Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di SDN Pulau Tambak). *Jurnal MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, Vol. 2, No. 1, hal 301–312.

Inayah, S.,et al (2025). *Sistem Informasi Manajemen.* Majalengka: Cv Edupedia Publisher.

Marthasari, A.U. (2024) *Pelayanan Administrasi Penduduk Berbasis Elektronik.* Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Meidiansyah, A.T., et al,. (2024). *Bunga Rampai Penerapan Ilmu Kepolisian.* Bandung: Kaizen Media Publishing.

Pane, S.F., Fadillah, M.D., & Zamzam M. (2020). *Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online.* Kreatif Industri Nusantara.

Putra, H., Wulandari, D. Y., & Siregar, A. I. B. (2024). *Meningkatkan Disiplin Karyawan Dan Staf Pengajar Menggunakan Absensi Online.* PT. Serasi Media Teknologi.

Purwanti, D. (2022*). Efektivitas Perubahan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru*. CV. Azka Pustaka.

Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Deepublish

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitati*f. Bandung: Alfabeta.

Sukandar., et. al (2025). *Book Chapter Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan.* Yogyakarta: Semesta Aksara

Syamsurijal, C. A. (2025). *Teori Praktik Manajemen Keuangan Publik di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Menghadapi Turbulensi Ekonomi*. Jakarta: Gremedia Pustaka Utama.